

# Penerapan *E - Government* Melalui Arsip Digital Desa: Studi Kasus Desa Larangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

Oleh:

Filosovi Tri Andini,

Lailul Mursyidah

Progam Studi Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Januari, 2025



# Pendahuluan

Indonesia tengah mengalami pergeseran besar menuju sistem pemerintahan yang demokratis, transparan, dan supremasi hukum. Untuk memajukan tata kelola yang baik dan mengimbangi kemajuan teknologi. Pemerintah sedang mengembangkan model layanan elektronik yang dikenal sebagai *E-government*. Junaidi (2015) mendefinisikan *E-government* sebagai penerapan teknologi informasi, termasuk layanan internet dan perangkat digital, untuk memfasilitasi pertukaran informasi antara entitas pemerintah dan publik, bisnis, karyawan, dan organisasi terkait lainnya secara online. Pada tahun 2003, pemerintah mengumumkan INPRES No. 3 Tahun 2003, yang menguraikan Strategi dan Undang-Undang Nasional *E-government*. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mengintegrasikan manajemen dokumen dan sistem informasi elektronik, sehingga meningkatkan layanan publik lintas batas. Dengan demikian, *E-government* memfasilitasi penggunaan teknologi untuk meningkatkan operasi pemerintah, khususnya dengan meningkatkan partisipasi publik dan aksesibilitas layanan. Didorong oleh perkembangan tersebut, pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Sidoarjo di Jawa Timur, termotivasi untuk melaksanakan inisiatif *E-government*. Kabupaten Sidoarjo, dengan ibukotanya di Sidoarjo, bertujuan untuk menciptakan wilayah yang makmur, maju, dan berkelanjutan dengan mempromosikan pemerintahan yang bersih, transparan, dan gesit melalui digitalisasi, selaras dengan Peraturan Presiden No. 95 tahun 2018. Oleh karena itu, Kabupaten Sidoarjo terus meningkatkan *E-government*, termasuk penggunaan arsip digital.

# Pendahuluan

Pelaksanaan arsip digital juga diterapkan pada desa – desa di Kabupaten Sidoarjo salah satunya di Desa Larangan Kecamatan Candi. Desa Larangan memiliki jumlah 9 Rukun Warga (RW) dengan jumlah Rukun Tetangga (RT) sebanyak 47, hal tersebut menjadikan pemerintah desa harus melakukan pemantauan dan penyimpanan data yang ada di Desa Larangan. Karena itu arsip digital telah menjadi komponen penting dalam manajemen informasi kontemporer. Kemajuan teknologi dan kebutuhan saat ini ialah penyimpanan yang lebih efisien, mudah diakses, dan dapat disimpan dalam jangka panjang. Dalam penerapan arsip digital di Desa Larangan dari RT 01 sampai RT 47 hanya RT 47 yang menerapkan arsip digital dengan menggunakan aplikasi database warga RT (Rukun Tetangga), dikarenakan kurangnya dukungan dari pemerintah desa seperti sosialisasi disetiap RT (Rukun Tetangga) untuk melakukan arsip digital. Sebab terbatasnya sumber daya manusia pada pemerintah desa dalam memahami teknologi dan infrastruktur untuk mengembangkan aplikasi database warga RT (Rukun Tetangga) disetiap RT (Rukun Tetangga) sebagai arsip digital belum memadai. Tidak hanya itu aplikasi database warga RT (Rukun Tetangga) masih belum terhubung dengan pihak pemerintah desa atau aplikasi bersifat pribadi bagi RT 47. Oleh karena itu perlu adanya penerapan *E-government* untuk memberikan solusi menyeluruh bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan arsip digital.

# Pendahuluan

Penerapan *E-government* diantisipasi dapat memberikan solusi menyeluruh bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan arsip digital. Menurut INPRES No. 3 Tahun 2003, strategi pembangunan *E-government* disusun menjadi empat tingkat progresif. Level 1) Persiapan berfokus pada pengaturan awal, yang mencakup pengembangan situs informasi dalam setiap institusi, pelatihan sumber daya manusia, dan membangun fasilitas yang dapat diakses seperti pusat komunitas multiguna, kafe internet, dan pusat UKM. Fase ini juga melibatkan promosi situs informasi ini kepada pengguna internal dan masyarakat umum; Level 2) Maturation melibatkan pembuatan platform informasi publik interaktif dan membangun koneksi antarmuka dengan institusi lain. Tahap ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kegunaan informasi yang tersedia bagi masyarakat; Level 3) Penguatan berpusat pada pengembangan platform untuk transaksi layanan publik dan memastikan interoperabilitas antara aplikasi dan data di berbagai institusi. Fase ini berupaya meningkatkan integrasi dan efisiensi pelayanan publik; Level 4) Pemanfaatan bertujuan untuk menerapkan aplikasi terintegrasi untuk layanan *Government to Government* (G2G), *Government to Business* (G2B), dan *Government to Citizen* (G2C). Tahap akhir ini dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan sistem *E-government* untuk merampingkan interaksi dan layanan di berbagai sektor.

# Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Bedasarkan pada penjelasan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tahapan penerapan *E-government* melalui arsip digital desa?
2. Bagaimana prosedur penerapan *E-government* melalui arsip digital desa?
3. Bagaimanakah kendala dalam penerapan *E-government* melalui arsip digital desa?

# Penelitian Terdahulu

Anggun Pratiwi dkk. (2021)

Penerapan *E-Government* Dalam Mewujudkan Transparansi Administrasi Pemerintahan Desa (Studi tentang Pemerintahan Desa Bulu Timoreng)

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi *E-government* dalam meningkatkan transparansi dalam administrasi desa Desa Bulu Timoreng yang terletak di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Laporan ini juga berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi dalam pemerintahan desa. Temuan menunjukkan bahwa penerapan sistem *E-government* di Desa Bulu Timoreng kurang optimal. Tantangannya termasuk fasilitas yang tidak memadai di kantor desa, yang menghambat transparansi informasi yang efektif

Berliana Putri dkk. (2023)

Penerapan *E-government* Melalui Pelaksanaan Program Kartu Id Digital Di Dr. Desa Soetomo Kota Surabaya.

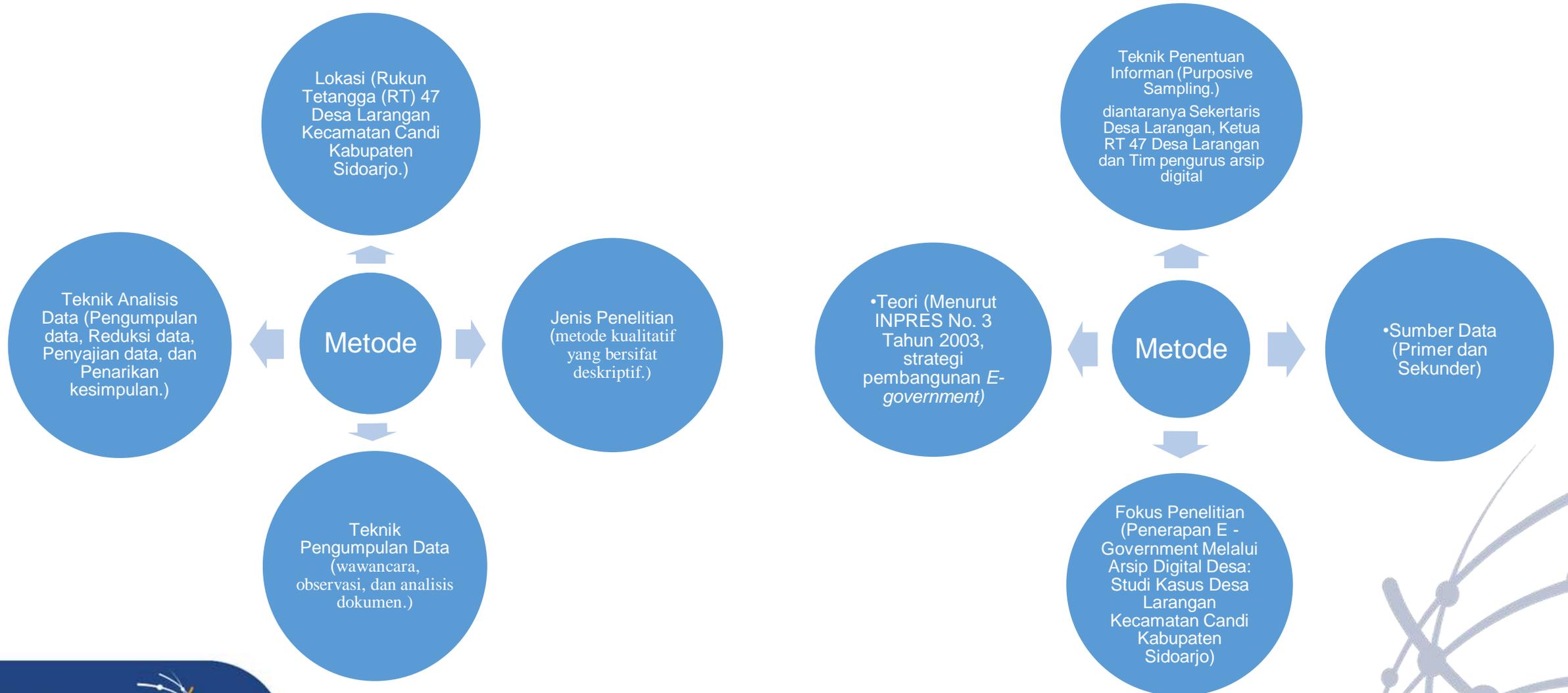
penelitian mereka mengungkapkan bahwa penerapan *E-government* di DR. Desa Soetomo telah menghadapi tantangan. Isu-isu ini termasuk keterlibatan masyarakat yang tidak memadai, sumber daya manusia yang tidak memadai, dan upaya penjangkauan yang terbatas oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang aktivasi kartu identitas digital

Bonefasius Bao dkk. (2023)

Penerapan *E-government* dalam Pelayanan Publik di Kota Jayapura

Penelitian mereka mengungkapkan berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasi *E-government*. Salah satu hambatan utama adalah kekurangan sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih untuk mengoperasikan sistem tersebut secara efektif. Selain itu, masalah infrastruktur teknologi komunikasi juga menjadi penghalang signifikan, termasuk keterbatasan akses internet yang cepat dan stabil di berbagai daerah. Pendanaan yang tidak mencukupi untuk mendukung pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ini juga turut memperburuk situasi. Di samping itu, tantangan organisasi, seperti resistensi terhadap perubahan dan kurangnya koordinasi antar lembaga, memperumit upaya untuk mengintegrasikan *E-government* secara menyeluruh. Secara keseluruhan, faktor-faktor ini saling berkaitan dan menciptakan hambatan yang kompleks dalam pelaksanaan inisiatif *E-government* yang efektif. Terlepas dari kesulitan-kesulitan ini, implementasinya telah menekankan prinsip transparansi dalam pelayanan publiknya

# Metode



# Hasil dan Pembahasan

## A. TAHAPAN PENERAPAN E – GOVERNEMENT MELALUI ARSIP DIGITAL DESA.

Penerapan arsip digital yang dilakukan RT 47 Desa Larangan Kabupaten Sidoarjo sebagai bentuk reformasi dari RT dalam mewujudkan desa maju yang menerapkan *E-government* dari bawah. Penerapan arsip digital di RT 47 ini dilakukan sejak tahun 2013 guna mengurangi penggunaan kertas yang berlebihan bermula dari kegiatan warga yang selalu dicatat pada buku seperti data bank sampah, tanaman toga, jimpitan, UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) warga yang mengalami kerusakan, kehilangan dan tidak tertata secara rapi sehingga ketua RT memberikan inovasi untuk pencatatan dan data dilakukan secara digital dengan adanya penanggung jawab. Penerapan arsip digital ini juga mengajarkan warga dalam penggunaan IT (Informasi Teknologi) dan memudahkan warga menerima informasi dengan mudah, meningkatkan transparansi dan menghindari terjadinya kesalahpahaman pada pengelola data.

# Hasil dan Pembahasan

## B. PROSEDUR PENERAPAN E – GOVERNEMENT MELALUI ARSIP DIGITAL DESA.

Penerapan aplikasi database warga rukun tetangga (RT) sebagai bentuk penerapan *E-government* melalui arsip digital desa menjadi bentuk inovasi yang dilakukan dari instansi pemerintah paling bawah. Tujuan penerapan aplikasi *database* warga Rukun Tetangga (RT) adalah untuk menyimpan data warga dari kerusakan, kehilangan, mengurangi penggunaan kertas dan sebagai penyampaian informasi yang transparan pada warga. Meskipun dalam tahapan penerapan belum sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003. Namun inovasi yang dilakukan Desa Larangan RT 47 cukup membantu pihak pemerintah Desa Larangan dalam penyimpanan data warga, memberikan edukasi pada warga terhadap perkembangan teknologi dan pemanfaatan sumber daya manusia dengan membentuk struktur kepengurusan dalam penerapan *E-government* pada RT 47 Desa Larangan.

# Hasil dan Pembahasan

## C. KENDALA DALAM PPENERAPAN E – GOVERNMENT MELALUI ARSIP DIGITAL DESA.

Dalam penerapan dan pengembangan suatu sistem tidak lepas dari suatu faktor penghambat yang dimana ini dari internal ataupun eksternal. Seperti yang disampaikan oleh salah satu tim pengurus bahwa sumber daya manusia adalah faktor kunci dalam keberhasilan pelaksanaan program. Kualitas dan kecukupan sumber daya manusia akan menjadi penopang utama dalam mencapai suksesnya penerapan *E-government* melalui arsip digital ini. Namun sejauh ini penerapan arsip digital ini belum dikatakan maksimal. Dikarenakan tim pengurus arsip digital memiliki pekerjaan utama masing – masing jadi waktunya terbagi dan umur sudah tidak mudah lagi. Sehingga untuk menginput data dan meningkatkan sistem lebih baik lagi perlu banyak belajar

# Kesimpulan

Di Desa Larangan, pelaksanaan *E-government* melalui arsip digital masih dalam tahap persiapan. Tahap ini mencakup beberapa kegiatan utama: membangun portal informasi untuk masing-masing institusi, mengembangkan sumber daya manusia, dan menyiapkan fasilitas yang dapat diakses seperti Pusat Komunitas Serbaguna, Kafe Internet, dan Pusat UKM. Selain itu, upayanya mencakup penyebaran informasi internal dan eksternal tentang sumber daya digital ini. Adanya struktural kepengurusan menjadikan prosedur penerapan e – government melalui arsip digital desa di Desa Larangan memiliki beberapa prosedur diantaranya koordinator wilayah mendata warga di setiap area yang sesuai dengan wilayah mereka dengan format file Word yang mencakup informasi seperti Kepala Keluarga, Alamat, Telepon, Status rumah, Jumlah anggota keluarga, serta nomor Kartu Keluarga dan Nomor Induk Keluarga (NIK) yang digantikan dengan nomor rumah untuk menjaga keamanan data. Kemudian pada langkah kedua data dalam bentuk word tersebut dikumpulkan dan di input pada aplikasi database warga rukun tetangga (RT) oleh ketua dan wakil ketua RT sebagai pemegang portal aplikasi. Pada penyimpanan data terkait bank sampah, Tanaman toga, Koperasi RT, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dilakukan oleh koordinator lapangan dengan cara mendata setiap warga kemudian data tersebut dibuat Qrcode dan ditempelkan disetiap rumah warga agar informasi dapat diakses oleh warga mengenai hal tersebut.

Namun, dalam proses penerapan *E-government* melalui program desa digital, ada beberapa isu yang muncul, termasuk sumber daya manusia yang tidak sepenuhnya digunakan dan beberapa fasilitas yang disediakan pemerintah desa, seperti aturan dan regulasi tentang digitalisasi. Berdasarkan hasil studi tersebut, para peneliti merekomendasikan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan mengenai digitalisasi dan untuk mengembangkan aplikasi database untuk pengguna RT di seluruh dunia yang dapat dihubungkan dengan instansi pemerintah. Mereka juga menyediakan fasilitas pendukung agar aplikasi dapat terus berfungsi dan berkembang, yang pada akhirnya memungkinkan desa untuk ditingkatkan.

# Referensi

- [1] Junaidi, “E-Government Dalam Bingkai Reformasi Administrasi Publik Menuju Good Governance,” *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, vol. 9, no. 1. pp. 55–67, 2015.
- [2] K. D. A. Sari and W. A. Winarno, “JEAM Vol XI No. 1/2012 1,” *J. Ilmu Sos. dan Polit.*, vol. XI, no. 1, pp. 1–19, 2012.
- [3] P. Auliyaa, R. Hidayat, and R. Nababan, “Implementasi pelayanan publik berbasis e-government melalui ogan lopian,” *Kinerja*, vol. 18, no. 4, pp. 502–512, 2022, doi: 10.30872/jkin.v18i4.9804.
- [4] N. Irma, B. Ginting, and J. Leviza, “Penerapan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Binjai,” vol. 2, no. 6, pp. 454–466, 2023.
- [5] PBB, “Peringkat E-government Indonesia.” [Online]. Available: <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/78-Indonesia/dataYear/2022>
- [6] Pemerintah Pusat, “Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,” *Menteri Huk. Dan Hak Asasi Mns. Republik Indones.*, p. 110, 2018.
- [7] B. Barthos, *Manajemen kearsipan : Untuk lembaga negara, swasta dan perguruan tinggi / Basir Barthos*, Ed. 1. Cet. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- [8] Sri Wulandari, Aghnia Dian Lestari, and Otto Fajarianto, “Penggunaan Aplikasi Digital Kearsipan Pada Paud Arrahman Desa Karangmangu Kabupaten Cirebon,” *Abdimas Awang Long*, vol. 4, no. 2, pp. 39–44, 2021, doi: 10.56301/awal.v4i2.210.
- [9] P. Anggun, “Penerapan E-government Dalam Mewujudkan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan Desa (Studi pada Pemerintahan Desa Bulu Timoreng),” vol. 9, pp. 130–139.
- [10] B. Putri, O. Reviandani, F. Ilmu, I. Politik, and U. Pembangunan, “PENERAPAN E-GOVERNMENT MELALUI PELAKSANAAN PROGRAM KTP DIGITAL DI KELURAHAN DR . SOETOMO KOTA SURABAYA Transaksi Elektronik serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 mengenai Layanan Pengelolaan Kependudukan Secara Daring ,” vol. 09, pp. 78–96, 2023.

# Referensi

- [11] B. Bao, H. V. Ayomi, H. Bakri, and P. Ndibau, “Penerapan E-Government dalam Pelayanan Publik di Kota Jayapura,” vol. 05, no. 02, pp. 4147–4157, 2023.
- [12] P. Rahmaini, “Penerapan Prinsip E-Government sebagai Wujud Inovasi Pelayanan Publik di Era Modern Tahun 2021,” vol. 1, pp. 46–51, 2021.
- [13] Minuchin, “No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title,” vol. 4, pp. 147–173, 2003.
- [14] G. R. Somantri, “Memahami Metode Kualitatif,” *Makara Hum. Behav. Stud. Asia*, vol. 9, no. 2, p. 57, 2005, doi: 10.7454/mssh.v9i2.122.
- [15] Y. Priatna, “Peran Pengelolaan Arsip Digital Universitas Muhammadiyah Ponorogo Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Administrasi Universitas,” *J. Pustaka Budaya*, vol. 8, no. 2, pp. 64–73, 2021, doi: 10.31849/pb.v8i2.6420.
- [16] I. N. 3 T. 2003, “Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003,” *CWL Publ. Enterp. Inc., Madison*, vol. 2004, no. May, p. 352, 2004, [Online]. Available: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cbdv.200490137/abstract>
- [17] W. Vani and U. M. Yogyakarta, “Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4 . 0 Kontemporer di Indonesia Vani Wirawan sebelumnya dan terdapatnya ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan yang bersih ( clean governance ) dan berwibawa serta bebas,” vol. 1, no. 1, pp. 1–16, 2020, doi: 10.18196/jphk.1101.
- [18] T. Rudi M, *Pedoman penyusunan Standard Operating Procedures (SOP)*, Kedua. 2013.
- [19] M. Mariam and I. Kudus, “Analisis Penerapan Electronic Government (E-Gov) Di Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung,” *Neo Politea*, vol. 3, no. 2, pp. 39–50, 2022, doi: 10.53675/neopolitea.v3i2.1081.
- [20] S. Ibad and Y. W. Lolita, “Pengembangan Pelayanan Publik Melalui E-Government (Studi Pada Layanan Smartcity Kabupaten Situbondo),” *Agustus*, vol. 6, no. 2, pp. 221–226, 2020.

